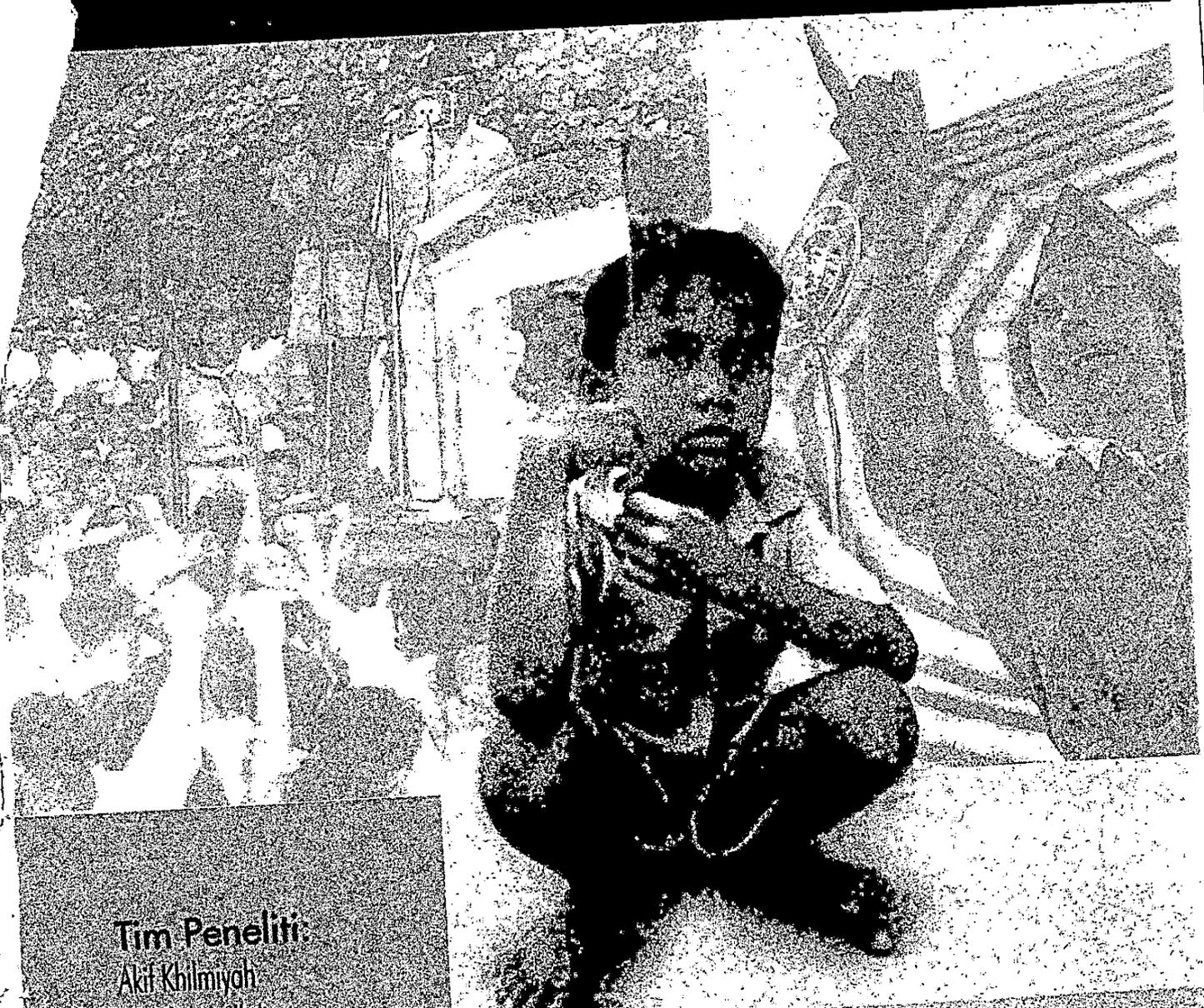


# LAPORAN

## Evaluasi Pendidikan Kewiraan/Pendidikan Kewargaan & Studi Kelayakan Pengembangan Civic Education di Perguruan Tinggi Muhammadiyah



**Tim Peneliti:**  
Akif Khilmiyah  
Isnani Muallidin  
Muhammad Sayuti  
Rahmawati Hussein  
Ulung Pribadi



Lembaga Penelitian  
& Pengembangan Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta



THE ASIA FOUNDATION



Majelis DIKLATIBANG  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

## KATA PENGANTAR

Bagi Bangsa Indonesia, munculnya gelombang reformasi di akhir 1990-an tentu membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi dan perwujudan masyarakat madani di Indonesia. Meski demikian reformasi juga menyisakan persoalan-persoalan sosial yang belum terselesaikan. Membangun landasan demokrasi dan masyarakat madani yang kokoh, terutama dalam masa-masa transisi menuju demokrasi di mana banyak muncul *euphoria* politik, maka demokrasi dan masyarakat madani tidak hanya perlu diperjuangkan, tetapi juga harus disemaikan, ditanam, dipupuk, dan dibesarkan melalui upaya-upaya terencana, dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat.

Cara paling strategis untuk menumbuhkan demokrasi adalah melalui pendidikan, tepatnya adalah *civic education* (CE) atau Pendidikan Kewargaan. Pendidikan Kewargaan mengandung makna sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktik demokrasi dan keadaban. Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan kewarganegaraan antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya, harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan. Agaknya, pendidikan kewarganegaraan saat ini sudah sedemikian mendesak untuk dilakukan, dan Muhammadiyah sebagai salah satu bagian dari *civil society organizations* (CSO) perlu mengambil peran signifikan melalui jaringan amal usaha pendidikan yang tersebar di Indonesia, mulai dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

Pengembangan CE di Indonesia sebenarnya bukanlah agenda yang baru sama sekali, karena sebelumnya telah ada mata kuliah sejenis yakni Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Namun karena isinya berbeda dengan tujuan pengembangan *civil society* dan

pengajarannya cenderung indoktrinatif maka mata kuliah tersebut dirasa sudah tidak cocok lagi untuk diajarkan di era reformasi seperti saat ini.

Kehendak untuk mengembangkan CE di 163 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se Indonesia tentu membutuhkan desain yang betul-betul rapi dan didasarkan atas realitas yang benar-benar terjadi di lapangan. Penelitian evaluasi dan studi kelayakan CE ini diorganisir agar diperoleh desain yang terbaik bagi pengembangan CE di PTM sehingga paling tidak program CE ini lebih baik dari Pendidikan Kewiraan atau PKN.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Beberapa yang dapat kami sebut adalah Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, para pimpinan PTM yang menjadi lokasi penelitian beserta civitas akademika yang juga menjadi target penelitian ini. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada The Asia Foundation sebagai pihak yang mendanai program ini.

Yogyakarta, Mei 2002

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	<b>9</b>
1. Area dan Subyek Penelitian	9
2. Cara Pengumpulan Data	10
3. Analisis Data	10
4. Waktu Penelitian	11
<b>BAB III TEMUAN PENELITIAN</b>	<b>12</b>
A. Pendahuluan	12
B. Evaluasi	13
C. Sosialisasi dan Realisasi	16
1. Sosialisasi di tingkat kelembagaan	16
2. Sosialisasi di tingkat PTM	18
3. Respon pimpinan PTM	19
4. Realisasi	20
D. Kelayakan	21
E. Faktor Pendukung dan Penghambat	27
1. Faktor Pendukung	27
2. Faktor Penghambat	27
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>29</b>
A. Kesimpulan	29
B. Rekomendasi	31
<b>SUMBER RUJUKAN</b>	<b>33</b>

1. Panduan Wawancara
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional SK No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
3. Laporan Hasil Kegiatan Lokakarya Kurikulum MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Tanggal 18 Mei 2001. Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Edisi Kedua. Karya Daniel Frans Bessie Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Universitas Nusa Cendana.
5. Foto-foto